

Jurnal Pustaka Ilmiah

Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS

Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI) sebagai media kreasi para pustakawan, guru, dosen, dan praktisi dalam pengembangan profesi secara berkelanjutan. berbagai ide dan gagasan kreatif menjadi bahan kajian yang diimplementasikan dalam berbagai model pengembangan bahan pustaka, baik cetak maupun *online*. Kreativitas menjadi akar pengembangan ilmu pengetahuan sepanjang hayat dengan berbagai model pengembangan budaya literasi di perpustakaan. Keindahan dan kecermatan dalam sebuah tulisan ilmiah dan nonilmiah akan dapat direalisasikan secara nyata oleh sumber daya manusia untuk menghasilkan SDM yang unggul dan kreatif dengan membaca dan menulis untuk menyinari dunia. Budaya literasi menjadi upaya untuk pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi.

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab	: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.
Ketua Redaksi	: Dra. Tri Hardiningtyas, M.Si.
Wakil Redaksi	: Haryanto, M.IP.
Sekretaris	: Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP., Henny Perwitosari, A.Md.
Penyunting Ahli	: 1. Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. (Universitas Sebelas Maret); 2. Drs. Widodo, M.Soc.Sc. (Universitas Sebelas Maret); 3. Drs. Harmawan, M.Lib. (Universitas Sebelas Maret).
Penyunting	: Daryono, S.Sos., M.IP.; Riah Wiratningsih, S.S., M.Si., Dinar Puspita Dewi, S.Sos., M.IP.; Sri Utari, S.E.
Bendahara	: Nurul H., A. Md.; Novi Tri Astuti, A.Md.
Sirkulasi	: Aji Hartono, A. Md.; Agus Sriyono, A.Md.; Aris Suprihadi, S.IP.

**DITERBITKAN OLEH
UPT PERPUSTAKAAN UNS
REDAKSI JURNAL PUSTAKA ILMIAH**

Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A Ketingan, Surakarta 57126

Telp./Fax.: (0271) 654311; email: jurnal.pustaka.ilmiah@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

Salam Pustaka.

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. segenap Tim Redaksi Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI) mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi untuk penerbitan JPI volume 3 edisi Desember 2017. Penerbitan volume 3 nomor 2 kali ini JPI menyetengahkan tema: **Manajemen Koleksi**. Kehadiran JPI diharapkan dapat dijadikan sebagai media penulisan bagi para pustakawan, dosen, tenaga kependidikan, guru, dan praktisi untuk menuangkan ide dan gagasan kreatifnya secara tertulis.

Dalam penerbitan JPI volume 3 bulan Desember 2017 ini disajikan enam belas tulisan antara lain: (1) Evaluasi Pengembangan Koleksi sebagai Dasar Memahami Problematika dalam Perpustakaan (Studi Kasus Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo) (*Ade Yul Pascasari Katili*); (2) Pengembangan Sistem Otomasi dan Kendala-Kendala yang Dihadapinya (Studi Kasus di Perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang) (*Agus Wahyudi*); (3) Implementasi Manajemen Koleksi Bahan Pustaka bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Yogyakarta (Berdasarkan *Guidelines For Library Service To Prisoners* oleh Ifla) (*Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya*); (4) Urgensi Kebijakan Pengembangan Koleksi Khusus Muhammadiyah Corner Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (*Dwi Cahyo Prasetyo*); (5) Seleksi Bahan Pustaka dalam Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta (*Fitri Kartika Sari*); (6) Pengadaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia (*Hilda Syaf'aini Harefa*); (7) Implementasi Pengadaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Studi pada Perpustakaan Universitas Brawijaya (*Kethy Hariyadi Putri*); (8) Kebijakan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang (*Moh. Mustofa Hadi*); (9) Pengadaan Bahan Pustaka Tercetak pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (*Nurrahma Yanti*); (10) Kegiatan Penyiangian (*Weeding*) Buku, Pasca Integrasi Perpustakaan Fakultas dengan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta (*Sri Utari*); (11) Tantangan Pemimpin Perpustakaan Masa Kini Pengaturan kepada Pengguna: Generasi Nonmilenial dan Generasi Milenial (*Verry Mardiyanto*); (12) Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta (Didik Subagia); (13) Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Tercetak UPT Perpustakaan Universitas Janabdra Yogyakarta (Lisa Noviani Maghfiroh); (14) Mendekonstruksi Peran Kepemimpinan Perpustakaan Perguruan Tinggi Era *Net Generation* melalui Perspektif Teori Sosial Postmodern Jacques Derrida (Ach. Nizam Rifqi); (15) Pengembangan Koleksi dalam Bidang Pengadaan Bahan Pustaka Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara (Stikessu) Medan (Shinta Nofita Sari); (16) Analisis Evaluasi Bahan Pustaka dalam Kegiatan Pengembangan Koleksi Di UPT Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang (Hafidzatul Wahidah).

Akhirnya, redaksi JPI mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala UPT Perpustakaan UNS yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi untuk penerbitan JPI. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis, tim redaksi, dan Yuma Pressindo, yang telah mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI. Selamat membaca...

Surakarta, Desember 2017

Tim Redaksi

SAMBUTAN

Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.
Kepala UPT Perpustakaan UNS

Selamat dan sukses atas diterbitkannya kembali Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI). Jurnal ini sebagai media kreativitas dan pengembangan *softs skills* para pustakawan, guru, dosen, dan praktisi untuk menuangkan ide dan gagasan demi layanan perpustakaan yang prima dan unggul. Berbagai isu terkait dengan pengembangan perpustakaan, pelayanan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, pendidikan, penelitian, pelestarian, dan budaya literasi akan menjadi topik-topik yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini.

Diterbitkannya JPI sebagai bukti kepedulian UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dalam rangka turut berpartisipasi mengembangkan dan membudayakan literasi untuk para pustakawan dan civitas akademika di UNS maupun luar UNS. Berbagai model pengembangan *softs skills* menjadi alternatif untuk membekali dan memperkuat jaringan kerja sama penulisan antar kelembagaan. Dengan demikian, kerja sama antar pustakawan dan pemustaka dapat diwujudkan dengan berbagai model dalam bidang literasi.

Penerbitan JPI merupakan sarana untuk memotivasi semua pustakawan agar berkarya di bidang penulisan, baik ilmiah maupun nonilmiah. Para pustakawan harus menjadi pionir dalam bidang penulisan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan keteladanan para pustakawan yang memroses, menyajikan, dan menikmati bahan-bahan pustaka cetak dan noncetak di perpustakaan. Ketersediaan bahan pustaka akan menjadi bahan paling nyata untuk dikembangkan dalam berbagai model perwujudan teknik penulisan. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pustakawan adalah semangat untuk berbagai pengetahuan melalui tulisan.

Kepedulian setiap sumber daya manusia kepada kelembagaan dapat dituangkan dalam berbagai model pengabdian, salah satunya adalah melalui tulisan. Berbagai ide dan gagasan dapat direalisasikan dengan berbagai model bentuk artikel jurnal, buku, modul, monograf, dan lain sebagainya. Para civitas akademika, guru, pustakawan, praktisi harus memiliki keterampilan menulis sebagai bentuk perwujudan pengembangan diri secara berkelanjutan. Berbagai tulisan dan referensi sudah disajikan tetapi masih sangat minim untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Banyak orang pandai dalam berbicara tetapi masih sedikit yang menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan.

Akhirnya, keluarga besar UPT Perpustakaan UNS mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor, pengelola JPI, penulis, dan semua pihak yang telah mendukung penerbitan JPI. Semoga dengan diterbitkannya JPI ini dapat menjadi media untuk menulis para pustakawan, dosen, guru, dan praktisi dalam bidang iptek dan seni. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada percetakan Yuma Pressindo yang telah membantu mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI ini. Akhirnya, semoga JPI dapat memberikan nilai kemaslahatan untuk umat.

Surakarta, Desember 2017

DAFTAR ISI

JURNAL PUSTAKA ILMIAH EDISI KHUSUS: VOLUME 3 NOMOR 2/ Desember 2017

Tema: Manajemen Koleksi

Evaluasi Pengembangan Koleksi sebagai Dasar Memahami Problematika dalam Perpustakaan (Studi Kasus Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo) <i>Ade Yul Pascasari Katili, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>	341-351
Pengembangan Sistem Otomasi dan Kendala-Kendala yang Dihadapinya (Studi Kasus di Perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang) <i>Agus Wahyudi, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang</i>	352-368
Implementasi Manajemen Koleksi Bahan Pustaka bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Yogyakarta (Berdasarkan <i>Guidelines For Library Service To Prisoners</i> oleh Ifla) <i>Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>	369-383
Urgensi Kebijakan Pengembangan Koleksi Khusus Muhammadiyah Corner Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta <i>Dwi Cahyo Prasetyo, Universitas Muhammadiyah Pontianak</i>	384-390
Seleksi Bahan Pustaka dalam Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta <i>Fitri Kartika Sari, Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta</i>	391-398
Pengadaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia <i>Hilda Syaf'aini Harefa, Universitas Sari Mutiara Medan</i>	399-406
Implementasi Pengadaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Studi pada Perpustakaan Universitas Brawijaya <i>Kethy Hariyadi Putri, Universitas Brawijaya</i>	407-416
Kebijakan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Akademi Kesehatan Asih Husada Semarang <i>Moh. Mustofa Hadi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>	417-430
Pengadaan Bahan Pustaka Tercetak pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar <i>Nurrahma Yanti, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>	431-439

Kegiatan Penyiangan (<i>Weeding</i>) Buku, Pasca Integrasi Perpustakaan Fakultas dengan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta <i>Sri Utari, Universitas Sebelas Maret Surakarta</i>	440-447
Tantangan Pemimpin Perpustakaan Masa Kini Pengaturan kepada Pengguna: Generasi Nonmilenial dan Generasi Milenial <i>Verry Mardiyanto, Institut Perbanas Kampus Bekasi</i>	448-460
Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta <i>Didik Subagia, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta</i>	461-466
Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Tercetak UPT Perpustakaan Universitas Janabadra Yogyakarta <i>Lisa Noviani Maghfiroh, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>	467-474
Mendekonstruksi Peran Kepemimpinan Perpustakaan Perguruan Tinggi Era <i>Net Generation</i> melalui Perspektif Teori Sosial Postmodern Jacques Derrida <i>Ach. Nizam Rifqi, UPT perpustakaan Politeknik Negeri Malang</i>	475-484
Pengembangan Koleksi dalam Bidang Pengadaan Bahan Pustaka Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara (STIKESSU) Medan <i>Shinta Nofita Sari, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatra Utara</i>	485-494
Analisis Evaluasi Bahan Pustaka dalam Kegiatan Pengembangan Koleksi Di UPT Perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang <i>Hafidzatul Wahidah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>	495-505

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA
BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA
YOGYAKARTA (BERDASARKAN *GUIDELINES FOR LIBRARY SERVICE TO
PRISONERS* OLEH IFLA)**

Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: agustianbhaskoro@gmail.com

ABSTRACT

The topic discussed in this research is how is the implementation of the collection management of library material for inmates in correctional facility level IIA of Wirogunan Yogyakarta (Based on Guidelines for Library Service to Prisoners by IFLA). The research employs descriptive-qualitative approach. Researchers will investigate and explain the facts narratively to be further described as they have been found in the field. Researchers will describe the results with comparator indicators that use the standard collection management for prisoners. The research end to the conclusion that the implementation of the collection management of library material for inmates in corectional facility level IIA Wirogunan Yogyakarta (Based on Guidelines for Library Service to Prisoners by IFLA) is already establised, but still many not yet according to standard which writer make as indicator. Lack of facilities that fit the ergonomics, still not according to the needs of the user, the collection of the number is still lacking, and staff who are far from expectations because it is not from a professional librarian.

Keywords: *collection management, collection management for prisioners, inmates, penitentiary, IFLA*

ABSTRAK

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen koleksi bahan pustaka bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta (Berdasarkan Guidelines for Library Service to Prisoners oleh IFLA). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan melalui deskriptif kualitatif. Peneliti akan memaparkan dan menggambarkan serta menggali fakta yang disampaikan secara naratif dengan mendeskripsikan hasil penelitian dengan indikator pembanding yaitu menggunakan standar manajemen koleksi bagi warga binaan di sebuah lembaga pemasyarakatan dari IFLA. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi manajemen koleksi di lembaga pemasyarakatan klas IIA Wirogunan Yogyakarta (Berdasarkan Guidelines for Library Service to Prisoners oleh IFLA) sudah diberikan dan berjalan namun masih banyak yang belum sesuai standar dari indikator yang penulis jadikan acuan. Kurangnya fasilitas yang sesuai dengan ergonomis, masih belum sesuainya kebutuhan koleksi pemustaka, bahan koleksi yang jumlahnya masih kurang, serta staff yang jauh dari harapan karena bukan berasal dari pustakawan yang profesional.

Kata kunci: manajemen koleksi, manajemen koleksi di penjara, warga binaan, lembaga pemasyarakatan, IFLA

PENDAHULUAN

Informasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia, terutama pada saat era keterbukaan informasi saat ini. Informasi dapat kita temukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Kita sebagai manusia yang bebas akan dapat dengan mudah mengakses segala macam informasi melalui berbagai macam media yang ada saat ini. Kebebasan akan mengakses sebuah informasi sudah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak dalam berpendapat dan berekspresi. Di Indonesia hak untuk mendapatkan informasi sudah tertuang pada pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang tentang hak asasi manusia juga ikut mengatur mengenai hak mendapatkan informasi yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Informasi dapat diperoleh darimana saja. Salah satunya dari perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi. Perpustakaan tidak terlepas dari kegiatan untuk menyediakan informasi bagi penggunaannya sesuai kebutuhan pengguna sehingga dibutuhkan suatu manajemen koleksi. Hal berbeda mungkin akan terjadi jika seseorang dipenjara dan harus menjalani hukuman pada sebuah lembaga pemasyarakatan.

Tentu akan menarik untuk dikaji tentang Bagaimana implementasi manajemen koleksi bahan pustaka di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta (berdasarkan *Guidelines for Library Service to Prisoners oleh IFLA*). Penulis menggunakan aturan dasar dari IFLA (International Federation of Library Associations dan Institution) dikarenakan belum adanya aturan yang spesifik yang mengatur hal-hal tersebut di negara kita. Penulis memilih Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta karena merupakan lembaga pemasyarakatan terbesar di Yogyakarta dan penulis juga telah melakukan observasi sebelumnya. Penulis membatasi artikel ini dalam ruang lingkup Ilmu Perpustakaan.

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak diperlukan hipotesis. Menurut teori Sugiyono metode penelitian deskripsi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, serta menentukan apa yang dilakukan dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman informan untuk menetapkan rencana dan keputusan yang akan datang.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sebelum di lapangan dan analisis data setelah di lapangan. Pada tahap awal penulis mencari sumber data berupa studi pustaka untuk mengangkat *issue* sosial kemudian melakukan pra observasi. Pada tahap selanjut adalah analisis data setelah penelitian berupa aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data dinyatakan sudah jenuh.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti dalam tahapan program tertentu. Proses implementasi baru dapat dimulai apabila baik tujuan atau sasarannya telah di tetapkan, program kegiatannya telah terencana dan tersusun, dana telah siap, serta dana tersebut telah siap untuk dipergunakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pengertian lain bahwa implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat berupa perintah-perintah ataupun keputusan yang penting ataupun yang dapat berasal dari sebuah badan peradilan. Jadi implementasi dapat disimpulkan merupakan bentuk dari pelaksanaan suatu kebijakan tertentu yang telah direncanakan atau disusun sesuai dengan rencana dan program kerja sesuai atau tidak dengan sasaran yang akan dicapai sehingga nanti akan dilakukan evaluasi sejauh mana pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan jika tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau bisa disebut dengan lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pada pasal 5 undang-undang yang sama, lebih rinci dijelaskan bahwa sistem pembinaan ditentukan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya lembaga pemasyarakatan

merupakan tempat untuk memperbaiki baik bagi narapidana baik secara fisik atau mental melalui program-program yang telah disediakan di dalamnya tanpa menghilangkan hak-hak yang melekat pada setiap narapidana agar bisa hidup normal dan diterima kembali di masyarakat.

3. Warga Binaan

Warga binaan dalam sebuah lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi tiga yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwasannya narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan. Masih dalam undang-undang yang sama pada Pasal 1 ayat (6) terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pada ayat lain yaitu ayat (8) dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan merupakan anak yang dalam putusan pengadilan harus menjalani atau diserahkan pada negara atas yang telah mendapatkan persetujuan orang tua yang telah memperoleh yang telah ditetapkan pengadilan untuk menjalani pidana, dididik, serta ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan klien lembaga pemasyarakatan dalam undang-undang dan pasal yang sama pada ayat (9) merupakan seseorang yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwasannya warga binaan merupakan orang yang terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang dan harus menjalani masa hukumannya sesuai dengan ketetapan hukum yang tetap dan ditempatkan lembaga pemasyarakatan agar dibina dan dididik menjadi lebih baik agar dapat diterima kembali di masyarakat.

4. Hak Warga Binaan dalam Mendapatkan Bahan Bacaan

Warga binaan pada lembaga pemasyarakatan mungkin sudah kehilangan sebagian kemerdekaannya. Hanya saja mereka tetap mendapatkan perlakuan yang sama dan hak untuk memanfaatkan sumber informasi yang tidak dilarang. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 poin 6 sudah di atur bahwasanya warga binaan berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang, di antaranya adalah berhak mendapatkan bahan bacaan berupa media cetak dan elektronik yang sudah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan yang menunjang kepribadian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta berhak membawa dan mendapatkan bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan seizin kepala lembaga pemasyarakatan.

Perpustakaan disediakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan akses kepada agar warga binaan agar dapat mengakses sumber-sumber informasi. Hal ini sejalan dengan dengan peran perpustakaan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007 dalam pasal 5 ayat (1) poin a yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.

5. Implementasi Manajemen Koleksi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta

a. Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta

Tujuan utama dari sebuah perpustakaan adalah sebagai tempat untuk transfer informasi sehingga dari perpustakaan kita mendapatkan

informasi yang kita cari. Informasi adalah kumpulan data dalam bentuk yang dapat dipahami, terekam pada kertas atau media lainnya yang mampu untuk berkomunikasi. Informasi merupakan kata benda bermakna pengetahuan yang diberikan pada seseorang dalam bentuk yang dapat dipahami orang lain. Pengertian informasi yang lainnya adalah *information is knowledge shared by communication* yang berarti bahwa komunikasi itu merupakan pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan. Sehingga komunikasi merupakan pengetahuan yang dikomunikasikan dengan bahasa yang dapat diterima oleh akal manusia agar dapat dipahami.

Pada sebuah lembaga pemasyarakatan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 32 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengakses informasi dalam pasal 27 yang menyatakan setiap lembaga pemasyarakatan menyediakan media informasi berupa media cetak dan elektronik dan harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana serta anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan lagi dalam undang-undang yang sama pasal 28 bahwa setiap lembaga pemasyarakatan menyediakan sekurang-kurangnya 1 buah pesawat televisi, 1 buah radio, dan media elektronik lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan observasi di lapangan yang penulis lakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 didapatkan beberapa

hasil untuk dapat dikaji lebih lanjut, agar lebih mudah menjelaskan penulis sajikan menggunakan tabel-tabel di bawah ini. Adapun sumber data-data di bawah ini berasal dari

wawancara dengan bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta, pada tanggal 2 Oktober 2017.

Tabel 1. Sejarah Pergantian Nama Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta

Sejarah Pergantian Nama	Sudah ada sejak jaman colonial Belanda (1910-1915) Gerangenis En Van Bevaring Penjara Belanda Kepenjaraan DIY Kantor Direktorat Tuna Warga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta
-------------------------	---

Tabel 2. Data Warga Binaan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	291
2	Nasrani	21
3	Budha	1
	Jumlah	313

Tabel 3. Data Warga Binaan Berdasarkan Pekerjaan Semula

No	Pekerjaan Semula	Jumlah
1	Ex. TNI	7
2	Ex. PNS	20
3	Pedagang	19
4	Petani	21
5	Tidak Bekerja	56
6	Lain-Lain	190
	Jumlah	313

Tabel 4. Data Warga Binaan Berdasarkan Lamanya Hukuman

No	Lamanya Pidana	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1	B I (>1 tahun)	189	53	242
2	B II A (3-12 bulan)	24	20	44
3	B II B (0-3 bulan)	3	-	3
4	B III K (subsider)	15	-	15
5	Hukuman Mati	4	3	7
6	Hukuman Seumur Hidup	2	-	2
	Jumlah	237	76	313

Tabel 5. Data Jumlah Blok di Lembaga Pemasyarakatan

No	Nama Blok	Keterangan Blok
1	BLOK A	Merupakan tempat warga binaan kasus NARKOTIKA
2	BLOK B	Merupakan tempat khusus untuk warga binaan yang melanggar aturan di dalam lembaga pemasyarakatan
3	BLOK C	Blok wanita
4	BLOK D	Blok untuk yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dan masih menjalani masa pengenalan lingkungan
5	BLOK E	Blok untuk warga binaan yang bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan

6	BLOK F	Blok untuk warga binaan yang telah menjalani ½ masa tahanan
7	BLOK G	Terbagi menjadi 2 tempat, yaitu untuk warga binaan yang masih menjalani masa pengenalan lingkungan dan untuk warga binaan titipan dari rumah tahanan dan kasusnya belum selesai diputuskan oleh pengadilan
8	BLOK H	Khusus untuk warga binaan kasus TIPIKOR

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Warga Binaan

No	Keterangan Kegiatan	Keterangan Waktu
1	Jam buka sel dan sarapan	07.00
2	Jam mulai kegiatan untuk tahanan yang bekerja di lembaga pemasyarakatan, untuk yang tidak bekerja masuk sel lagi pukul 09.00	09.00-17.00
3	Jam makan siang dan ibadah	11.30-12.30
4	Jam ibadah ashar dan persiapan makan malam	15.00-14.00
5	Pemanfaatan televisi, radio, dan telepon	Sesuai jadwal di atas kemudian dapat dimanfaatkan maksimal pukul 22.00, jam ibadah televisi dan radio wajib mati.

b. Indikator Implementasi Manajemen Koleksi

Manajemen Koleksi merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan bahan pustaka, pengadaan, penyiangan, serta evaluasi terkait pengadaan koleksi. Istilah pengembangan koleksi di era sekarang bisa disebut sebagai pengembangan koleksi. Wortman menyebutkan ada lima asumsi yang mendasari diperlukannya pengembangan koleksi, yaitu:

- 1) Keberadaan koleksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna
- 2) Sebuah koleksi dapat ditinjau secara luas
- 3) Setiap koleksi merupakan rangkaian yang menyeluruh, karena setiap koleksi mempunyai karakter yang unik.

- 4) Setiap koleksi bersifat dinamis
- 5) Perpustakaan merupakan sebuah tempat orang untuk menemukan berbagai koleksi

Adapun prinsip dasar yang harus dipegang dalam pengembangan koleksi menurut Gunawan adalah:

- 1) Relevansi, merupakan aktifitas pemilihan pengadaan terkait masyarakat pengguna yang dilayani sebuah perpustakaan
- 2) Kelengkapan, artinya koleksi perpustakaan sebisa mungkin tersedia selengkap mungkin dengan memperhatikan setiap komponen dengan memperhatikan kewajaran sesuai dengan tingkat prioritas
- 3) Kemutakhiran, artinya sumber informasi yang yang disediakan di perpustakaan haruslah diupayakan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan atau *up to date*.

- 4) Kerjasama, artinya perpustakaan tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pihak pihak terkait.

Selain prinsip dasar di atas yang dapat menjadi pegangan, penulis menggunakan kebijakan dari IFLA untuk memudahkan dalam menganalisis implementasi manajemen koleksi yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Guidelines for Library Service to Prisoners* menjelaskan bahwa ada 9 poin penting, yaitu administrasi, akses, fasilitas, teknologi informasi, staff, pembiayaan, konten perpustakaan, pelayanan dan program perpustakaan, dan yang terakhir adalah fungsi komunikasi dan pemasaran. Indikator-indikator di tersebut penulis akan bandingkan dengan kenyataan yang ada berdasarkan observasi di lapangan dan data yang penulis dapatkan selama melakukan observasi. Adapun hasilnya adalah sbb:

1) Administrasi

Ada beberapa poin dasar untuk menganalisa indikator administrasi menurut ALA, diantaranya adalah sbb:

- a) kebijakan mengenai pengembangan koleksi di perpustakaan lembaga pemasyarakatan haruslah tertulis dan jelas menyebutkan visi dan misi yang telah ditentukan serta sumber pendanaan dan administrasi tanggung jawab layanan, kebijakan tersebut haruslah sesuai dengan UU perpustakaan yang ada di setiap negara.

- b) Kebijakan perpustakaan haruslah berlandaskan pada

pembangunan perpustakaan pada umumnya, seperti pemilihan bahan koleksi, pengolahan sirkulasi, keterpakaian, penyiangan, kepatuhan hak cipta, kepegawaian, penganggaran, layanan pembaca, dan penggunaan teknologi informasi.

- c) Kontribusi masing-masing pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpustakaan harus diuraikan secara jelas.
- d) Perpustakaan haruslah melakukan evaluasi kebutuhan untuk perkembangan ke depan paling tidak rencana 3-5 tahun ke depan yang berguna untuk memastikan bahwa segala kebijakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.

2) Akses

Ada beberapa poin penting sebagai indikator akses di sini, yaitu:

- a) Akses perpustakaan harus tersedia bagi semua warga binaan terlepas dari klasifikasi kasus setiap warga binaan.
- b) Warga binaan paling tidak diberikan waktu seminggu sekali untuk memanfaatkan perpustakaan.
- c) Jam perpustakaan harus diatur sebaik mungkin agar tidak terjadi konflik jadwal dengan kegiatan lain warga binaan.
- d) Adanya akses yang diberikan kepada warga binaan khusus.
- e) Disediaknya minimal 2 koleksi untuk setiap warga

- binaan, serta deposit koleksi minimal sebanyak 100 bahan koleksi yang terpopuler, serta diganti setiap bulannya dan warga binaan diberikan kesempatan minimal memanfaatkan 2 koleksi setiap minggu.
- f) Mengingat tidak mungkin perpustakaan mampu memenuhi semua kebutuhan warga binaan untuk menyediakan koleksi, perpustakaan harus melakukan kerjasama dengan badan atau instansi lain.
 - g) Perpustakaan harus menyediakan akses khusus bagi warga binaan dengan keterbatasan fisik tertentu.
- 3) Fasilitas
- a) Perpustakaan harus didesain nyaman mungkin dan sesuai dengan fungsinya sehingga menghasilkan perpustakaan yang ramah dan nyaman.
 - b) Lokasi perpustakaan harus berada di bagian sentral lembaga pemsyarakatan, sehingga mudah dijangkau semua warga binaan dan terutama yang berkebutuhan khusus.
 - c) Perpustakaan harus menempati lokasi terpisah dan bangunannya dapat dikunci.
 - d) Perpustakaan harus menyediakan ruangan yang mempertimbangkan aspek-aspek ergonomis perpustakaan, seperti kontrol iklim, kebutuhan listrik yang cukup, ruang penyimpanan yang dapat dikunci, telepon keluar, serta sistem komunikasi darurat. Fasilitas yang lain adalah adanya meja dan kursi bagi pemustaka, area tampilan untuk buku, ruang untuk berkegiatan, dan komputer. Tempat duduk paling tidak mampu menampung 5% dari jumlah populasi warga binaan yang ada. Luas rak haruslah 15 meter persegi per 1000 jilid. Area kerja staff harus 9 meter persegi per orang dan kantor perpustakaan minimal 9 meter persegi.
- e) Perabotan perpustakaan dipilih berdasarkan asas keefektifan, kenyamanan, daya tarik, kemudahan perawatan, dan daya tahan dan diatur sesuai dengan konfigurasi keamanan.
- 4) Teknologi Informasi
- Beberapa indikator penting yang jadi acuan teknologi informasi di perpustakaan lembaga pemsyarakatan adalah sbb:
- a) Perpustakaan di lembaga pemsyarakatan harus memanfaatkan teknologi terkini namun keamanan tetap dikedepankan.
 - b) Perpustakaan harus menerapkan sistem sirkulasi dan katalog otomatis
 - c) Penggunaan teknologi informasi harus dimanfaatkan berdasarkan asas informasi, pendidikan, dan rekreasi.
 - d) Tersedianya akses internet namun tetap diawasi melalui regulasi yang diatur oleh pihak lembaga pemsyarakatan.
- 5) Staff
- Indikator-indikator yang masuk ke dalam staff adalah sbb:

- a) Semua perpustakaan di lembaga pemasyarakatan terlepas dari besar atau kecil perpustakaanannya haruslah diawasi dan dikelola oleh pustakawan yang professional yang memahami segala informasi dan kompetensi untuk memahami kompleksnya kebutuhan warga binaan dengan kualifikasi dan ketrampilan yang sesuai dan berasal dari lulusan sarjana ilmu perpustakaan.
 - b) Semua lembaga pemasyarakatan yang mempunyai populasi warga binaan di atas 500 orang haruslah mempunyai pustakawan yang penuh waktu melayani dan staff tambahan dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan institusi.
 - c) Staff perpustakaan dapat dipekerjakan oleh dari dalam institusi atau melalui kerja sama dengan badan yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan.
 - d) Gaji dan tunjangan pustakawan di dalam lembaga pemasyarakatan sama dengan gaji pustakawan pada umumnya.
 - e) Staff perpustakaan haruslah diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara professional dan melanjutkan pendidikan.
 - f) Staff perpustakaan harus melayani semua warga binaan tanpa diskriminasi.
 - g) Relawan dari komunitas yang ikut berperan dalam literasi dapat ikut dilibatkan, bahkan dapat dijadwalkan pada waktu khusus untuk membuat program khusus.
- 6) Pembiayaan
 - Pembiayaan yang ada di perpustakaan lembaga pemasyarakatan haruslah bertanggung jawab terhadap penganggaran dan memastikan bahawa perpustakaan mempunyai alokasi khusus pada item baris terpisah pada alokasi tahunan. Selain itu staff perpustakaan haruslah membuat laporan tahunan berdasarkan anggaran tahunan yang digunakan.
 - 7) Konten Perpustakaan
 - a) Konten haruslah berisi materi yang berbentuk cetak atau format lainnya.
 - b) Koleksi perpustakaan haruslah ditingkatkan secara regular yang dipilih oleh pustakawan professional.
 - c) Pinjaman dari instansi lain harus dikelola dan bukan sebagai alternatif pengembangan koleksi yang direncanakan.
 - d) Bahan koleksi haruslah dipilih sesuai dengan kebijakan yang ada pada lembaga pemasyarakatan dan direncanakan sesuai dengan demografi populasi di lembaga pemasyarakatan seperti komposisi etnis/ budaya, kebutuhan referensi yang sesuai dengan program-program yang ada di lembaga pemasyarakatan, adanya rekomendasi usulan koleksi dari pemustakanya, adanya prosedur penyiangan dan

- prosedur terkait sumbangan.
- e) Kesesuaian koleksi haruslah mempertimbangkan namun tidak hanya terbatas pada kesesuaian subjek dan gaya untuk pemustaka, menarik minat dan kebutuhan pemustaka, berisi isu-isu kritik, sosial, ilmiah, budaya serta yang bersifat faktual serta biaya, dan tidak mengesampingkan koleksi kuranag populer karena menyediakan dengan beberapa kelompok yang minoritas.
 - f) Koleksi perpustakaan haruslah mencakup jenis formt alternatif lainnya baik audio ataupun video.
 - g) Bahan pustaka haruslah diatur sedemikian rupa berdasarkan jumlah populasi yaitu buku kurang lebih 2000 judul atau sepuluh judul per warga binaan, mana yang lebih besar. Majalah minimal 20 judul atau satu langganan per dua puluh warga, binaan, atau mana yang lebih besar. Serta disediakannya perangkat multimedia dan computer yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 8) Pelayanan dan Program Perpustakaan
- Pelayanan dan program perpustakaan mencakup beberapa hal yang hampir sama dengan poin 2 di atas hanya saja ditambahkan dengan memperhatikan luas dan tingkatan didasarkan pada aspek demografis populasi lembaga pemsayarakatan. Selain itu adalah meningkatkan peran perpustakaan

sebagai tempat untuk memberikan kesempatan untuk kreatif dalam memanfaatkan waktu dan meningkatkan kualitas hidup.

- 9) Fungsi Komunikasi dan Pemasaran
- Fungsi komunikasi dan pemsaran mencakup hal-hal sbb:
- a) Pustakawan harus tetap berkomunikasi dua arah dengan warga binaan sehingga saran dari warga binaan dapat diapresiasi untuk meningkatkan kualitas perpustakaan.
 - b) Pustakawan harus meningkatkan kerjasama dengan intansi lainnya untuk kemajuan perpustakaan sehingga ada umpan balik.
 - c) Walaupun pustakawan ikut terisolasi secara tidak langsung, bukan berarti pustakawan menutup diri dari sebuah jaringan professional pustakawan agar pustakawan tetap bisa mengembangkan dirinya melalui palatihan-pelatihan diluar serta konferensi ataupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi di lembaga pemsayarakatan klas IIA Wirogunan, penulis dapat mendeskripsikan dan membandingkan kenyataan di lapangan dengan indikator-indikator yang seharusnya menjadi standar dalam manajemen koleksi bahan pustaka pada sebuah lembaga pemsayarakatan berdasarkan *Guidelines for Librariy Service to Prisoners* oleh ALA, untuk memudahkan penulis akan mendeskripsikan melalui tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR	IMPLEMENTASI
1	Administrasi	Berdasarkan temuan di lapangan bahwasannya belum digunakan kebijakan yang secara tertulis terkait sistem administarasi dan evaluasi perpustakaan terkait kebutuhan jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan perpustakaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wirogunanan Yogyakarta bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri. Secara organisasi perpustakaan ini di bawah Bidang BIMASWAT (Bimbingan Pemsayarakatan dan Perawatan). Jadi secara administrasi masih menjadi satu dengan bidang tersebut.
2	Akses	Berdasarkan temuan di lapangan bahwasannya untuk akses perpustakaan sudah strategis yaitu berada langsung di dalam gedung yang jadi satu dengan ruangan staff-staff bidang yang terdapat di lembaga pemsayarakatan. Pemanfaatan perpustakaan dibagi menjadi dua yaitu untuk warga binaan yang mendapatkan program asimilasi di sela-sela bekerjanya yaitu pukul 09.00-17.00 dan untuk yang tidak mendapatkan program asimilasi pada pukul 07.00-09.00 dan pada pukul 15.00-17.00. Jadwal untuk mengunjungi juga di atur yaitu hari senin dan jumat untuk BLOK C, Selasa dan Kamis untuk BLOK E, F, G, serta hari Rabu dan Sabtu untuk Blok A, D, H sehingga warga binaan harus mengikuti jadwal tersebut. Namun yang belum dilaksanakan adalah ketersediaan akses paling tidak 1 bulan sekali. Perpustakaan melakukan pergantian koleksi sekitar 3 bulan koleksi. Pengadaan koleksi bekerjasama dengan BPAD DIY selain dari hadiah hadiah dari pengunjung atau peneliti.
3	Fasilitas	Berdasarkan kajian ergonomis luasnya bangunan perpustakaan, menurut penulis terlalu kecil. Ruangan kurang lebih berukuran 2x4 m. terdapat 4 buah rak buku, 1 buah televisi, dan 1 buah perangkat komputer. Tentu saja sangat kurang mengingat banyaknya populasi warga binaan di lembaga pemsayarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.
4	Teknologi Informasi	Berdasarkan temuan di lapangan, komputer yang disediakan di lembaga pemsayarakatan merupakan komputer biasa yang hany abisa digunakan untuk mengetik di MS Word dan MS Excel. Di dalamnya juga tidak disediakan akses internet dengan alasan keamanan.
5	Staff	Perpustakaan di Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA tidak menggunakan staff yang berasal dari lulusan Ilmu Perpustakaan. Staff ditunjuk langsung dari staff BIMASWAT dan sebagai penanggung jawab koleksi ditunjuklah satu warga binaan yang sudah mendapatkan program asimilasi. Alasannya adalah pihak lembaga pemsayarakatan sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada BPAD DIY untuk menyediakan koleksi setiap 3 bulan sekali. Sementara untuk gaji, tidak ada alokasi khusus dengan gaji, karena perpustakaan masuk dalam tanggung jawab bidang BIMASWAT.

6	Pembiayaan	Tidak ada biaya khusus dalam menganggarkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Biasanya fasilitas perpustakaan merupakan hibah dan diambil dari anggaran di bawah bidang BIMASWAT.
7	Konten Perpustakaan	Konten yang tersedia di lembaga pemasyarakatanAN Klas IIA wirogunan berasal dari kerjasama dengan BPAD DIY. Tidak ada kriteria khusus dalam pengadaan koleksi dan hanya berisi buku-buku tercetak. Hal ini dikeluhkan dari beberapa warga binaan yang kebutuhan penulis ditemui di ruang perpustakaan. Mereka menginginkan koleksi-koleksi yang terbaru dan <i>terupdate</i> dan kalau bisa jangan 3 bulan sekali. Koleksi-koleksi tentang kewirausahaan, motivasi, keagamaan adalah mayoritas yang mereka butuhkan.
8	Pelayanan dan Program Perpustakaan	Secara pelayanan menurut penulis perpustakaan di lembaga pemasyarakatan kurang sesuai jika dilihat secara demografis populasi warga binaan. Program-program yang diadakan juga belum ada hanya sebatas pinjam koleksi saja.
9	Fungsi Komunikasi dan Pemasaran	Kerjasama antar lembaga sudah dengan baik dilaksanakan yaitu bekerjasama dengan BPAD DIY. Hanya saja dibutuhkan peran langsung oleh pustakawan untuk terlibat dalam mensukseskan peran perpustakaan sebagai fungsi rekreasi dan pengembangan diri dengan menyediakan pustakawan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sumber: wawancara bidang BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas masih ditemukan banyak kekurangan dalam implementasi manajemen koleksi bahan pustaka di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta. Sistem administrasi yang masih jadi satu dengan lembaga pemasyarakatan, belum adanya kebijakan yang tertulis untuk mengatur manajemen koleksi. Perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan diatur langsung oleh bidang BIMASWAT (Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan) dan ditunjuk satu warga binaan untuk mengelola perpustakaan. Itu juga jauh dari harapan bahwasannya perpustakaan dikelola oleh seorang pustakawan yang profesional di bidangnya. Staff yang diberi tugas adalah dari warga binaan

itu sendiri. Itu pun jika warga binaan itu akan selesai menjalani masa pidana, warga binaan itu akan menyerahkan tanggung jawab kepada warga binaan lain yang mendapatkan program asimilasi.

Masalah yang terjadi rata-rata di setiap lembaga pemasyarakatan adalah belum adanya staff yang profesional sesuai dengan bidangnya. Seperti yang dikemukakan oleh Gillian dan Karen bahwa *“and finally, these jails have limited staff, which makes it impossible to manage anything beyond a bare necessity of providing something, anything for the inmates to read to pass the time. Considering the jails’ collecting method, the current collections surveyed seemed to be of questionable intellectual quality to meet*

more than the minimal reading needs of the population they serve. Although the role of providing reading material is a vital part of the jail culture”.

Selain itu, berdasarkan empat prinsip pengembangan koleksi menurut Gunawan yaitu Relevansi, Kelengkapan, Kemutakhiran, serta Kerjasama, dapat penulis jabarkan di bawah ini:

1. Relevansi, koleksi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunana Yogyakarta belum terlalu memperhatikan relevansi, mengingat berdasarkan wawancara dengan warga binaan, harapan mengenai koleksi-keloksi yang dibutuhkan seperti kewirausahaan dan motivasi masih sedikit sekali.
2. Kelengkapan, terkait dengan kelengkapan, berdasarkan observasi di lapangan serta wawancara dengan salah satu warga binaan, koleksi masih kurang lengkap, karena sebagian besar menurut salah satu warga binaan, dan belum memenuhi harapan warga binaan, karena warga binaan belum pernah ditanya kebutuhan koleksi yang diinginkan.
3. Kemutakhiran, terkait dengan hal ini, rata-rata koleksi telah mutakhir atau *up to date*, hanya saya belum sesuai dengan koleksi yang diinginkan oleh warga binaan.
4. Kerjasama, terkait dengan kerja sama, pengadaan koleksi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta bekerjasama dengan BPAD DIY, hanya saja, koleksi buku hanya datang 3 bulan sekali, dan belum adanya pustakawan yang khusus disediakan di lembaga

pemasyarakatan untuk terjun langsung melayani warga binaan setiap hari, bukan 3 bulan sekali.

Selain itu sarana dan prasarana yang disediakan juga sudah ada, namun masih jauh dari harapan. Televisi yang berada di ruangan tersebut juga tidak dapat digunakan. Sistem pengkatalogan juga masih manual dan menggunakan bantuan Microsoft excel untuk labelling misalnya. Letak perpustakaan yang berada di lantai bawah di bagian pinggir menyebabkan pencahayaan yang kurang. Komputer juga hanya ada satu. Koleksi yang disediakan menurut penulis belum dilandaskan pada kebutuhan pemustaka. Hanya sekedar bahan koleksi yang dapat digunakan untuk menghilangkan bosan. Koleksi yang hanya datang 3 bulan sekali tentu membuat semakin kurang menariknya perpustakaan untuk dikunjungi.

Maka dari itu dibutuhkan komitmen kuat untuk setiap instansi yang berkaitan dengan hal tersebut untuk menyediakan layanan perpustakaan yang tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan hak warga binaan. Seperti dikemukakan dalam IFLA *“in many developing countries, the idea of offering education, rehabilitation, and meaningful employment is still not widely accepted, let alone the concept that offenders have rights, not only to decent and humane treatment, but also to read and to freely access information”*. Gagasan mengenai pendidikan, rehabilitasi, dan pekerjaan, dan dapat di terima di masyarakat pada warga binaan di negara berkembang masih belum berjalan dengan baik, sementara kita seharusnya tetap memegang konsep bahwa mereka juga punya hak yang sama, layak,

serta manusiawi seperti membaca dan mengakses informasi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas yang penulis deskripsikan sesuai dengan acuan dan kenyataan lapangan, menurut penulis implementasi manajemen koleksi bahan pustaka di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta belum berjalan dengan baik. Adapun poin-poin yang menyebabkan belum berjalan dengan baiknya implementasi manajemen di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta adalah:

- a. Fungsi perpustakaan di situ masih hanya sebatas melengkapi hak-hak warga binaan di lembaga pemsarakatan. Masih banyak yang masih perlu dibenahi sehingga peran perpustakaan dapat dimaksimalkan dalam menjadi tempat untuk mengembangkan diri dan mendapatkan informasi-informasi agar nanti ketika keluar dari lembaga pemsarakatan, warga binaan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali dan diterima masyarakat.
- b. Berdasarkan hasil temuan dari indikator IFLA yang penulis gunakan, dari 9 indikator (administrasi, akses, fasilitas, teknologi informasi, staff, pembiayaan, konten perpustakaan, dan pelayanan informasi, serta fungsi komunikasi dan pemasaran), baru 2 indikator yang telah berjalan dengan baik, yaitu akses serta fungsi komunikasi dan pemasaran.

- c. Berdasarkan empat prinsip dasar yang harus dipegang dalam pengembangan koleksi (relevansi, kelengkapan, kemutakhiran, dan kerjasama), baru 2 yang berjalan sesuai dengan harapan, yaitu kemutakhiran dan kerjasama.
- d. Penulis tetap mengapresiasi kinerja serta usaha dari lembaga pemsarakatan yang tetap menyediakan koleksi bahan pustaka serta memberikan hak dalam mengakses sumber informasi yang disediakan dengan bekerja sama dengan BPAD DIY.

2. Saran

- a. Perlunya ruangan yang kapasitasnya mungkin lebih besar dari yang sekarang dan tentu saja sesuai ergonomis ruangan.
- b. Sudah saatnya Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta menyediakan staff yang professional yang sesuai dengan bidang ilmu perpustakaan sehingga hal-hal teknis atau pun non teknis dapat dilakukan dan data berjalan sesuai yang diinginkan.
- c. Perlunya peningkatan sinergi antar lembaga terkait sehingga perpustakaan dapat ikut berperan dalam memperbaiki diri warga binaan agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakhtiyar. 2017. *Kiat Sukses Berprofesi Pustakawan dalam Perspektif Psikologi*. *Inovasi*. 1(19). 119-133.
- Basuki, Sulistyono. 2006. *Perpustakaan dan Informasi dalam Konteks Budaya*. Jakarta: Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi UI.
- Bertens. 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ellern, Gillian D dan Mason, Karen. 2013. *Library Services to Inmates in The Rural County Jails of Western North Carolina*. USA: North Carolina Library. 71(Spring/Summer). 15-22.
- Ellern, Gillian D dan Mason, Karen. 2013. *Library Services to Inmates in the Rural County Jails of Western North Carolina*. *Jurnal*. North Carolina Libraries. 71(Spring/Summer).
- Grindle, S Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gunawan, Arief. 2016. *Collection Development of Library of Research Center and Fisheries Development*. *Jurnal Pari: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, J.Pari*. 1(2).
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasaryakatan*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*
- Lehman, Vibeke. 2003. *Planning and Implementing Prison Libraries: Strategies and Resources, (World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council*. USA: Library Services and Education Technology Coordinator, Department of Corrections Madison, Wisconsin.
- Qolyubi, Syhabuddin dkk. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pengembangan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan IPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walgito, B. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wortman, William. 1989. *A collection Management: Background and Principles*. Chicago: American Library Association.